

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya KBRI Bangkok dalam menangani korban TPPO di Perbatasan Mae Sot-Myawaddy sudah dilakukan dengan langkah sekuritisasi. Upaya ini muncul dari kondisi genting dan mendesak yang dihadapi para WNI akibat terjerat sindikat penipuan daring yang bermodus lowongan kerja fiktif. Kasus TPPO ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah berkembang menjadi ancaman eksistensial yang secara nyata mengancam hak hidup, kebebasan, dan keselamatan para korban. Dalam hal ini, KBRI Bangkok sebagai perwakilan diplomatik Indonesia memegang peran penting sebagai aktor sekuritisasi yang bertugas mengangkat isu ini menjadi perhatian negara dan masyarakat internasional melalui langkah sekuritisasi. Hal tersebut dilakukan guna melindungi *referent object* yakni para WNI yang tertipu lowongan kerja fiktif yang kemudian mendapat eksploitasi di sindikat penipuan daring Myawaddy.

KBRI Bangkok secara konsisten menerapkan strategi komunikasi melalui pendekatan tindak tutur (*speech act*) yang mencakup tiga bentuk utama, yakni pernyataan publik, advokasi diplomatik, dan pelaporan media sebagai bentuk langkah sekuritisasinya. Terdapat tindak tutur direktif yang dilakukan KBRI Bangkok dan terbukti dalam berbagai himbauan yang disebarluaskan melalui unggahan media sosial resmi KBRI Bangkok yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan

masyarakat terhadap tawaran kerja mencurigakan yang berpotensi menjerumuskan pada perdagangan manusia atau sindikat TPPO. KBRI Bangkok juga aktif melakukan kegiatan advokasi diplomatik melalui berbagai forum diskusi internasional seperti Indonesia-Thailand Security Dialogue (ITSD) yang membahas upaya penjagaan dan pencegahan tantangan keamanan kawasan serta penanganan kejahatan lintas batas negara, seperti masalah TPPO di Myawaddy. Di sisi lain, penggunaan pelaporan media sebagai tindak tutur ekspresif, seperti unggahan foto, video, dan dokumentasi kegiatan repatriasi, menjadi sarana yang efektif untuk menunjukkan empati, tanggung jawab, serta transparansi negara kepada publik. Ketiga bentuk tindak tutur ini tidak hanya memperkuat narasi perlindungan, tetapi juga menjadi langkah awal sebelum dibentuknya tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) untuk segera menangani ancaman tersebut.

Langkah luar biasa selanjutnya yang diambil KBRI Bangkok sebagai perwakilan pemerintah Indonesia untuk melindungi WNI yang terjerat sindikat TPPO di Myawaddy adalah dengan melakukan penyelamatan dari lokasi tersebut untuk kembali ke tanah air. Proses tersebut diawali dengan menyediakan layanan *hotline* darurat yang bisa diakses secara mandiri oleh WNI yang memiliki masalah keimigrasian, kemudian KBRI Bangkok melakukan penjemputan para korban yang telah melewati asesmen National Referral Mechanism (NRM) terlebih dahulu oleh otoritas Thailand. Selain itu para WNI tersebut diberikan bantuan logistik sementara sebelum kemudian direpatriasi ke Indonesia. Setibanya di Indonesia mereka akan ditangani oleh Kementerian Sosial untuk dilakukan proses administrasi lanjutan sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Upaya-upaya tersebut tentunya

telah mendapat respon positif dari audiens, khususnya masyarakat Indonesia yang merasa terbantu dengan fasilitas yang diberikan KBRI Bangkok sebagai upaya perlindungan WNI dalam kasus TPPO ini, termasuk masyarakat Indonesia yang berterima kasih karena mendapati anggota keluarganya telah berhasil diselamatkan dari Myawaddy.

#### **4.1 Saran**

Kelemahan dari penelitian ini terletak pada keterbatasan akses terhadap data primer yang bersifat internal dan tidak dapat dipublikasikan secara terbuka oleh pihak KBRI, serta keterbatasan ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu wilayah tertentu. Oleh karena itu, untuk studi selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi ke wilayah-wilayah perbatasan lain yang juga menjadi jalur TPPO serta melakukan pendekatan multi-aktor yang mencakup perspektif korban, NGO, dan aparat setempat.